

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada masa saat ini, kecurangan telah banyak dilakukan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Kecurangan atau *fraud* merupakan suatu kesalahan yang dilakukan secara sengaja. Dalam lingkup akuntansi, konsep kecurangan atau *fraud* merupakan penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan dalam suatu entitas. Menurut Fitrawansyah (2014) berpendapat tentang *fraud* disektor pemerintahan sendiri berupa korupsi, melainkan memang benar-benar dipahami sebagai tindak kejahatan era publik, baik itu dari politisi maupun dari segmen pegawai negeri, dan serta dari berbagai pihak yang lain ikut juga terlibat dalam tindak tersebut yang secara tidak sewajarnya dan tidak legal dalam menyalahgunakan kepercayaan publik yang banyak dikuasakan mereka demi mendapatkan keuntungan secara individu.

Secara dari segi permasalahan, kasus korupsi dari sektor pemerintahan dibedakan menjadi dua, yaitu korupsi horizontal dan vertikal menurut (Tempo 2005). Korupsi horizontal adalah korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara di lembaga tertinggi, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sedangkan, korupsi vertikal adalah korupsi yang terjadi dari struktur pemerintahan dipusat bahkan pemerintahan didaerah provinsi, kabupaten/kota.

Indikator terjadinya kecurangan di Indonesia bisa dilihat dari beberapa yang telah disurvei, baik itu dilakukan oleh pihak institusi nasional maupun internasional. Data yang telah dipublikasikan oleh *Transparency International* (TI), menunjukkan Indonesia masih digolongkan sebagai kategori negara dengan tingkat korupsi yang masih sangat tinggi di dunia.

Banyaknya kasus kecurangan(*fraud*) yang disebabkan oleh kurangnya atau tidak adanya sistem pengendalian internal maka timbul lemahnya pengawasan, tidak adanya kejujuran, peraturan dan kinerja kerja sangat lemah sehingga pelaku tindak kecurangan dapat leluasa melakukan tindak kecurangan tersebut. Sistem dari pengendalian internal yang efektif dapat membantu dalam mendapatkan hasil monitoring yang baik. *American Institute of Certified Public Accountant* atau disebut dengan (AICPA) pada tahun 1947 menjelaskan bahwa pengendalian internal itu sangat penting, antara lain untuk mengendalikan kegiatan operasi secara efektif bagi entitas, menyediakan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan setiap manusia dan mengurangi potensi terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan. (Boynton, Johnson, & Kell, 2003:371).

Motivasi dari seorang untuk melakukan tindak kecurangan relatif berbeda-beda. Faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan diantaranya yang dijelaskan menurut Wolfe & Hermanson (2004) dimana *fraud* disebabkan oleh empat faktor yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*) dan kemampuan (*capability*). Keempat faktor ini biasa disebut dengan istilah *fraud diamond*. Tekanan (*pressure*) adalah dorongan yang ada pada umumnya dalam bentuk dan tekanan kebutuhan atau masalah finansial, gaya

hidup, serta tekanan dari pihak lain yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan *fraud*. Peluang (*opportunity*) adalah adanya kesempatan atau peluang yang memungkinkan terjadinya *fraud*, biasanya disebabkan karena *internal control* suatu entitas yang lemah, kurangnya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang secara kesengajaan. Rasionalisasi (*rationalization*) adalah pemikiran individu yang mengacu pada tindakannya sebagai suatu perilaku yang wajar, dimana pelaku tindak kecurangan mencari pembenaran atas tindakannya tersebut. Kemampuan (*capability*) merupakan unsur yang sangat penting untuk melakukan aksi tindak kecurangan.

Secara umum, dari segala bentuk kecurangan (*fraud*) yang sangat banyak terjadi di sektor pemerintahan/publik adalah korupsi (*corruption*). Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara sangat tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dipercayakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sangat besar oleh sepihak. Menurut Wilopo (2006) mengungkapkan bahwa didalam korupsi, tindakan yang lazim ini dapat dilakukan diantaranya adalah memanipulasi pencatatan dana, penghilangan dokumen atau aset, dan *mark-up* yang merugikan dari sektor keuangan negara atau perekonomian negara.

Kesesuaian seperti kompensasi juga sangat berpengaruh dalam salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*). Bagi seorang pegawai, kompensasi merupakan suatu *outcome* atau *reward* yang sangat penting, karena dengan adanya kompensasi yang diperoleh seseorang dapat memenuhi

kebutuhan hidupnya menurut (Adinda, 2015). Kompensasi tersebut akan memberikan sebuah contoh dorongan yang dapat memacu kepada pegawai agar segera menyelesaikan tugas atau pekerjaannya untuk mendapatkan *reward* tersebut. Namun, ketika kompensasi yang diterima pegawai dirasa tidak sesuai dengan kerja keras yang dilakukannya, maka timbul persepsi adanya ketidakadilan didalamnya. Hal ini dapat menyebabkan seorang pegawai merasa perlu adanya kompensasi lebih sesuai dengan adanya kerja keras yang selama ini telah dilakukan. Sehingga kejadian ini dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran dengan melakukan kecurangan (*fraud*).

Komitmen suatu organisasi yang dapat mengarahkan seorang pegawai untuk bisa melakukan berbagai macam tindakan, dalam hal ini adalah tindak kecurangan. Apabila seorang pegawai di suatu organisasi yang mempunyai komitmen organisasi yang tinggi terhadap organisasinya, maka hal ini dapat menurunkan terjadinya tingkat tindakan kecurangan. Agar kegiatan yang didalam suatu organisasi dapat berjalan efektif dan efisien, maka sangat perlu diberlakukan adanya peraturan organisasi. Penegakan dalam peraturan ini harus bersifat tegas dan kosekuensi agar dipatuhi oleh semua pegawai. Jika seorang pegawai terbukti melanggar peraturan yang telah dibuat, maka akan diberikan hukuman dengan tujuan pelanggaran tersebut dan tidak akan terjadi lagi pada masa mendatang. Menurut Adni (2017) mengungkapkan bahwa ketika persepsi terhadap penegakan dirasa kurang tegas, maka pada umumnya sangat berpengaruh untuk melakukan tindakan menyimpang seperti melakukan kecurangan yang akan sangat semakin tinggi, dan begitu pula sebaliknya.

Asimetri informasi merupakan kondisi dimana salah satu pihak dari pemilik informasi banyak yang dibanding dipihak lain, misal seperti pihak manajemen perusahaan yang memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pihak investor dipasar modal lain. tingkat asimetri informasi sendiri dapat memberikan efek bervariasi dari sangat tinggi ke tingkat rendah. Asimetri teori juga dapat memberikan efek dengan adanya keputusan keuangannya maupun dari segi finansial menurut (Atmaja, 2008). Yang selanjutnya Keadilan distriusi merupakan persepsi mengenai kesesuaian gaji atau kompensasi lain yang diterima oleh pegawai untuk dibandingkan dengan apa yang telah diberikan kepada organisasi. Jika seseorang mempersepsikan bahwa terdapat ketidakadilan yang dipersepsikan sehingga mengakibatkan adanya kecurangan. Kemudian Keadilan Distributif merupakan sebuah persepsi tentang nilai yang diterima oleh pegawai berdasarkan penerimaan suatu keadaan atau barang yang mampu mempengaruhi individu menurut (Supardi, 2008). Lalu, Keadilan prosedural merupakan pertimbangan yang dibuat oleh karyawan mengenai keadilan yang dipersepsikan mengenai proses dan prosedur organisasi yang digunakan untuk membuat keputusan alokasi dan sumber daya (Ivancevich, *et al.*, 2006). Selanjutnya, Sistem pengendalian internal pemerintahan merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu pimpinan dan keseluruhan pegawai agar bisa memberikan keyakinan yang memadai atas keberhasilan suatu organisasi yang efektif dan realistis, kehandalan laporan keuangan, perlindungan aset negara, kepatuhan dalam peraturan undang-undang pada pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintahan Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintahan. Selanjutnya Penegakan peraturan merupakan suatu dalam aktivitas hubungan dengan nilai yang terjabarkan dalam kaidah yang bagus dan pelaksanaan dari sikap dan tindakan sebagai uraian nilai tahap akhir, untuk memelihara dan melindungi pergaulan hidup menurut (Soekanto, 2011). Yang terakhir yaitu Komitmen organisasi merupakan salah satu keputusan dari anggota untuk tetap menjadikan anggota organisasi menurut (Colquitt, *et al.* 2009). Pegawai yang berhak memiliki komitmen organisasi lebih tinggi mengarah memiliki kepedulian terhadap kelangsungan hidup yang dibarengi ikut serta memiliki organisasi, serta dalam merasa bangga terhadap dirinya sendiri dari bagian organisasi itu. Kondisi ini disebabkan oleh hilangnya alasan bagi anggota organisasi nya yang melakukan kegiatan kecurangan laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Didi & Kusuma, 2018) Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada lokasi dan unit analisis yang digunakan. Lokasi penelitian ini yaitu di lingkungan Balaikota Yogyakarta dengan unit analisis BPKAD Kota Yogyakarta. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui pengaruh asimetri informasi, keadilan distributif, keadilan prosedural, pengendalian internal, penegakan peraturan, & komitmen organisasi secara simultan terhadap kecenderungan kecurangan(*fraud*); (2) mengetahui asimetri informasi, keadilan distributif, keadilan prosedural, pengendalian internal, penegakan peraturan, & komitmen organisasi secara parsial terhadap kecenderungan kecurangan(*fraud*); (3) mengetahui variabel yang berpengaruh dominan terhadap kecenderungan kecurangan(*fraud*).

Dari mediacom.id pada tanggal 23 Juli 2021 menurut Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY) menetapkan sebanyak 3 orang sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi di PD BPR Bank Jogja. Kasus tersebut menyebabkan kerugian negara hingga sebesar Rp 27 miliar rupiah. Oleh karena itu alasan penelitian memilih di kota Jogja karena, tingkat pada kecurangan yang terjadi di kota jogja belum sepenuhnya terbukti, maka untuk itu bisa membuktikannya, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di kota jogja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Asimetri Informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan?
2. Apakah Keadilan Distributif berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan?
3. Apakah Keadilan Prosedural berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan?
4. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan?
5. Apakah Penegakan Peraturan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan?
6. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan?

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari konteks, peneliti ini membatasi pembahasan masalah pada Asimetri Informasi, Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penegakan Peraturan, dan Komitmen Organisasi sebagai variabel independen. Peneliti juga membatasi responden hanya dilakukan di kantor BPKAD dipemerintahan Kota Yogyakarta.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Asimetri Informasi terhadap kecenderungan kecurangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Keadilan Distributif terhadap kecenderungan kecurangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Keadilan Prosedural terhadap kecenderungan kecurangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kecenderungan kecurangan.
5. Untuk mengetahui pengaruh Penegakan Peraturan terhadap kecenderungan kecurangan.
6. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi terhadap kecenderungan kecurangan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ada dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan referensi maupun wawasan tentang bagaimana cara menanggulangi dan menangani kasus kecurangan yang ada di dalam sebuah instansi pemerintahan kota yang ada di Indonesia. Dan bisa dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya dengan tema yang sama berkaitan dengan kecenderungan kecurangan (Fraud).

2. Manfaat Praktis

a. Untuk peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pengaruh Asimetri Informasi, Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penegakan Peraturan, dan Komitmen Organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (Fraud).

b. Bagi Kantor Pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bahan masukan kepada Kantor Pemerintahan khususnya Badan Pengelolaan Aset Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kota Yogyakarta mengenai pentingnya Asimetri Informasi, Keadilan Distributif, Keadilan Procedural, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penegakan Peraturan, dan Komitmen Organisasi.